Nurani: Jurnal Studi Agama dan Peradaban Spiritual
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 786 - 812
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Nurani/article/view/627
E-ISSN: 3124-9000

AKULTURASI BUDAYA SEBAGAI IDENTITAS PERADABAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN MUGHAL DI INDIA

Nahdatun Nisa[1], Nur Atiza[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *alyasyarlind@gmail.com[1*], andinuralisah02@gmail.com[2], idruslatif.iainbone@gmail.com[3]*

Info Artikel
Received: *08 Oktober 2026*
Revised : *19 Oktober 2026*
Accepted: *11 November 2026*
Published: *20 November 2026*

Keywords: *cultural acculturation, Mughal Dynasty, civilizational identity, Islamic civilization, Indo-Persian synthesis.*

Abstract
Cultural acculturation is an important process in the development of Islamic civilization, including during the Mughal Empire in India. The Mughal Empire witnessed interactions among Islamic, Persian, Central Asian, and Indian cultures that contributed to the formation of a distinctive civilizational identity. This study aims to analyze the process of cultural acculturation and its role in shaping the identity of Islamic civilization during the Mughal period. This research employs a qualitative method using a library research approach by collecting and analyzing relevant historical sources, books, and scholarly articles. The findings indicate that cultural acculturation during the Mughal period developed across various fields, including architecture, art, literature, government, education, and social life. These intercultural interactions produced distinctive cultural expressions and enriched the development of Islamic civilization in India. However, acculturation did not always occur harmoniously, as it was also influenced by rulers' policies, political interests, and prevailing social conditions. Therefore, cultural acculturation played a significant role in shaping the identity of Mughal civilization and demonstrates that Islamic civilization can develop through interaction with other cultures without necessarily losing its fundamental identity.

Kata Kunci*:* akulturasi budaya, Dinasti Mughal, identitas peradaban, peradaban Islam, sintesis Indo-Persia.

Abstrak
Akulturasi budaya merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan peradaban Islam, termasuk pada masa Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal memperlihatkan pertemuan antara kebudayaan Islam, Persia, Asia Tengah, dan India yang membentuk identitas peradaban dengan karakteristik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses akulturasi budaya serta peranannya dalam pembentukan identitas peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis sumber-sumber sejarah, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya pada masa Mughal berkembang dalam berbagai bidang, meliputi arsitektur, seni, sastra, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Interaksi antarkebudayaan tersebut menghasilkan bentuk kebudayaan yang khas dan memperkaya perkembangan peradaban Islam di India. Namun, proses akulturasi tidak selalu berlangsung secara harmonis karena turut dipengaruhi oleh kebijakan penguasa, kepentingan politik, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, akulturasi budaya berperan penting dalam membentuk

identitas peradaban Mughal sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan peradaban Islam dapat berlangsung melalui interaksi dengan kebudayaan lain tanpa harus menghilangkan seluruh identitas dasarnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban Islam merupakan bagian penting dari sejarah dunia karena menunjukkan bagaimana agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial saling berhubungan dalam membentuk masyarakat. Sejak berkembang di Jazirah Arab, Islam menyebar ke berbagai kawasan dengan kondisi sosial dan kebudayaan yang berbeda. Dalam proses penyebaran tersebut, Islam berinteraksi dengan tradisi masyarakat setempat sehingga melahirkan berbagai bentuk peradaban yang memiliki karakter tersendiri. Hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal dapat ditemukan dalam sejarah perkembangan Islam di Persia, Asia Tengah, Afrika Utara, Andalusia, dan India. Setiap wilayah memperlihatkan pengalaman sejarah yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, dan kebudayaan masyarakatnya (Faidi, 2020).

Salah satu contoh penting dari proses tersebut adalah Kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur setelah memperoleh kemenangan dalam Pertempuran Panipat pada 1526 M. Sejak awal perkembangannya, Mughal memiliki hubungan erat dengan tradisi politik dan kebudayaan Asia Tengah. Dalam perkembangannya, kerajaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Persia yang memiliki kedudukan penting dalam tradisi pemerintahan, sastra, dan seni istana. Pada saat yang sama, Mughal berkembang di tengah masyarakat India yang telah memiliki tradisi keagamaan, bahasa, seni, arsitektur, dan sistem sosial yang beragam. Pertemuan berbagai unsur tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya identitas kebudayaan Mughal.

Kerajaan Mughal tidak hanya dikenal melalui perluasan wilayah kekuasaan dan kekuatan militernya, tetapi juga melalui perkembangan seni, arsitektur, sastra, serta sistem pemerintahan. Peninggalan seperti Taj Mahal dan kompleks Fatehpur Sikri menunjukkan bahwa kebudayaan Mughal memiliki karakter tersendiri yang terbentuk melalui pertemuan berbagai tradisi. Penggunaan kubah, lengkungan, taman, kaligrafi, ornamen, serta teknik pembangunan yang melibatkan keterampilan pengrajin lokal memperlihatkan bahwa kebudayaan Mughal tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sumber pengaruh. Perkembangan tersebut merupakan hasil interaksi antara tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India (Dermawan et al., 2024).

Perkembangan kebudayaan pada masa Kerajaan Mughal juga perlu dipahami melalui hubungan antara kebijakan para penguasa, kehidupan masyarakat, dan kondisi politik yang melatarbelakanginya. Dalam sejarahnya, Mughal mengalami perkembangan sejak pemerintahan Babur hingga masa Akbar, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri dalam bidang pemerintahan, militer, seni, arsitektur, dan kebudayaan. Peninggalan sejarah Mughal memperlihatkan bahwa perkembangan peradaban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengembangkan tradisi dan keterampilan budaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akulturasi budaya Mughal perlu memperhatikan proses sejarah yang membentuk hubungan antara tradisi Islam dan kebudayaan India (Mahendra, 2025).

Akulturasi budaya dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan penyesuaian dan perubahan tanpa harus menghilangkan seluruh identitas kebudayaan asal. Akulturasi berbeda dari sekadar peniruan karena dalam proses tersebut unsur kebudayaan dapat dipilih, diubah, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sejarah Mughal, pengaruh Persia, misalnya, tidak hanya diterima dalam bentuk yang sama seperti di wilayah asalnya, tetapi juga mengalami penyesuaian dengan kondisi India. Demikian pula, unsur lokal India tidak selalu dipertahankan dalam bentuk yang tidak berubah, tetapi dapat berkembang melalui interaksi dengan tradisi lain.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan kebudayaan Islam dan Kerajaan Mughal. Penelitian pertama, Faidi (2020), membahas akulturasi budaya Islam dan India serta menunjukkan adanya interaksi dan penyesuaian budaya dalam kehidupan masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji akulturasi sebagai identitas peradaban Mughal. Selanjutnya, Dermawan et al. (2024) membahas perkembangan peradaban Islam pada masa Mughal dalam bidang politik, seni, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, tetapi belum berfokus pada proses akulturasi berbagai tradisi budaya. Sementara itu, Sarmin dan Toedien (2026) mengkaji transformasi sosial dan pendidikan Islam pada era Mughal, tetapi belum membahas akulturasi budaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada akulturasi budaya Islam, Persia, Asia Tengah, dan India dalam membentuk identitas peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal.

Akulturasi budaya pada masa Mughal juga dapat dikaji melalui perkembangan pendidikan Islam. Masyarakat India pada masa Mughal hidup dalam lingkungan yang memiliki keragaman agama, kebudayaan, dan tradisi intelektual. Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan lembaga pendidikan, kehidupan sosial, serta hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Perkembangan pendidikan menunjukkan bahwa pembentukan peradaban Mughal tidak hanya berkaitan dengan seni dan arsitektur, tetapi juga melibatkan perkembangan pengetahuan dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam memahami pembentukan identitas peradaban Islam di India (Sarmin & Toedien, 2026).

Akulturasi budaya juga dapat dilihat melalui perkembangan bahasa dan sastra. Bahasa Persia memiliki kedudukan penting dalam lingkungan administrasi dan kebudayaan istana Mughal. Penggunaannya dalam penulisan sejarah, sastra, dan dokumen pemerintahan memperlihatkan pengaruh tradisi intelektual Persia. Sementara itu, interaksi masyarakat yang menggunakan beragam bahasa turut membentuk perkembangan bahasa-bahasa lokal dan tradisi komunikasi di India. Proses tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya berkembang melalui kebijakan penguasa, tetapi juga melalui hubungan sehari-hari antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Meskipun demikian, proses akulturasi pada masa Mughal tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang selalu harmonis. Kebijakan para penguasa terhadap kelompok agama dan kebudayaan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan pemerintahan dan situasi politik. Kebijakan Akbar, misalnya, memperlihatkan sejumlah upaya membangun hubungan politik dengan kelompok masyarakat yang beragam. Sebaliknya, pada masa pemerintahan Aurangzeb (Alamgir 1) terdapat sejumlah kebijakan keagamaan yang lebih bercorak Islam ortodoks, seperti pemberlakuan kembali pajak jizyah terhadap penduduk non-Muslim pada tahun 1679. kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai hubungan agama dan kekuasaan dalam pemerintahan Mughal. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari struktur politik serta hubungan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal penting dilakukan untuk memahami bagaimana interaksi antara tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India membentuk identitas peradaban yang khas. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami akulturasi tidak hanya sebagai pertemuan kebudayaan, tetapi juga sebagai proses yang memengaruhi perkembangan seni, arsitektur, bahasa, sastra, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Dengan mengkaji berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal dalam sejarah peradaban Islam.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan Dinasti Mughal, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, khususnya dalam memahami akulturasi budaya sebagai proses yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan pembentukan identitas

peradaban. Kajian mengenai Dinasti Mughal selama ini cenderung memberikan perhatian secara terpisah terhadap aspek-aspek tertentu, seperti perkembangan arsitektur dan keindahan bangunan Taj Mahal (Wulandari et al., 2025), serta perkembangan politik dan ekspansi kekuasaan pada masa Babur dan Akbar (Faidi, 2020; Mahendra, 2025). Pembahasan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana interaksi antara tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India berlangsung melalui proses negosiasi, penyesuaian, serta ketegangan sosial dan politik, termasuk hubungan antara elite Muslim dan kelompok Rajput. Padahal, akulturasi budaya pada masa Mughal tidak hanya menghasilkan bentuk kebudayaan baru, tetapi juga berkaitan dengan upaya penguasa membangun legitimasi politik dan mempertahankan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis akulturasi budaya secara lintas bidang yang mencakup arsitektur, seni, bahasa, sastra, sistem administrasi, pendidikan, dan kehidupan sosial dengan memperhatikan hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan. Penelitian ini juga diarahkan untuk memahami pembentukan identitas peradaban Islam Mughal sebagai hasil interaksi berbagai tradisi budaya yang berlangsung secara dinamis, sehingga menghasilkan karakter peradaban yang khas dan kosmopolitan di India.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal serta menjelaskan hubungan antara tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India dalam pembentukan peradabannya. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk akulturasi dalam bidang arsitektur, seni, bahasa, sastra, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial serta menganalisis peranan penguasa dan masyarakat dalam proses tersebut. Melalui pembahasan ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pertemuan berbagai tradisi budaya membentuk identitas peradaban Islam yang memiliki karakter khas di India.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Mughal di India. Sumber primer yang digunakan meliputi *Akbarnāma*, *Ain-i-Akbari*, *Tūzuk-i-Jahāngīrī*, dan *Muntakhab-ut-Tawarikh*. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian melalui Google Scholar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan dokumentasi terhadap berbagai sumber yang membahas sejarah Daulah Mughal, kebijakan para penguasa, serta perkembangan kebudayaan Islam dalam bidang seni, arsitektur, pendidikan, bahasa,

sastra, dan ilmu pengetahuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu: (1) Heuristik, yakni mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian; (2) Kritik sumber, yaitu memeriksa keaslian dan kredibilitas sumber; (3) Interpretasi, yaitu menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh; dan (4) Historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian ke dalam tulisan sejarah secara sistematis.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya memahami proses akulturasi antara budaya Islam, Persia, Asia Tengah, dan India serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembentukan identitas kebudayaan dan kontribusi Daulah Mughal terhadap perkembangan peradaban Islam di India.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Kerajaan Mughal dan Akulturasi Budaya

Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berkembang di kawasan Asia Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 M setelah memperoleh kemenangan dalam Pertempuran Panipat melawan Ibrahim Lodi. Babur berasal dari lingkungan politik Asia Tengah dan merupakan keturunan Dinasti Timuriyah. Latar belakang tersebut berpengaruh terhadap pembentukan awal kerajaan, terutama dalam tradisi kepemimpinan, kebudayaan istana, dan hubungan dengan dunia Persia. Keberadaan Kerajaan Mughal kemudian memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan politik, pendidikan, seni, sastra, dan arsitektur Islam di India.

Setelah Babur wafat pada 1530 M, pemerintahan diteruskan oleh Humayun. Pada masa pemerintahannya, Mughal menghadapi persaingan politik dan militer yang menyebabkan kekuasaan kerajaan sempat melemah. Humayun kemudian berhasil memulihkan kekuasaannya sebelum wafat pada 1556 M. Perkembangan Mughal selanjutnya semakin kuat pada masa Akbar yang memerintah dari 1556 hingga 1605 M. Akbar memperluas wilayah kekuasaan dan mengembangkan sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat kedudukan politik kerajaan, tetapi juga membuka ruang bagi interaksi antara masyarakat Muslim dan Hindu dalam lingkungan pemerintahan (Agustina & Arbi, 2024).

Perkembangan Mughal tidak dapat dilepaskan dari keadaan masyarakat India yang telah memiliki tradisi kebudayaan yang beragam sebelum kedatangan Babur. Masyarakat India mengenal

berbagai bahasa, bentuk seni, tradisi keagamaan, dan sistem sosial. Ketika pemerintahan Mughal berkembang, unsur-unsur tersebut berinteraksi dengan tradisi Islam dan kebudayaan yang dibawa oleh kelompok penguasa serta elite kerajaan. Interaksi ini berlangsung melalui kegiatan pemerintahan, perdagangan, perkawinan politik, pembangunan, seni, dan hubungan sosial. Pertemuan berbagai tradisi tersebut menjadi salah satu dasar terbentuknya karakter kebudayaan Mughal yang memiliki ciri khas tersendiri.

Pada masa Akbar, hubungan politik dengan sejumlah penguasa Rajput memperluas keterlibatan elite lokal dalam pemerintahan. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebudayaan, tetapi juga dengan kebutuhan memperkuat kekuasaan kerajaan. Meskipun demikian, hubungan tersebut membuka kesempatan bagi pertukaran kebiasaan, keterampilan, dan tradisi di lingkungan istana. Interaksi antara penguasa Mughal dan elite Rajput juga terlihat dalam pembangunan tempat ibadah dan kegiatan kebudayaan. Pembangunan kuil oleh penguasa Rajput pada masa Mughal berkaitan dengan hubungan politik mereka dengan kerajaan, aspirasi budaya, serta kedudukan wilayah masing-masing. Hal ini memperlihatkan bahwa interaksi budaya berlangsung bersamaan dengan proses negosiasi kekuasaan (Asher, 2020).

Selain melalui pemerintahan dan pembangunan, proses akulturasi budaya pada masa Mughal juga berkembang melalui kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertemuan antara masyarakat Muslim dan Hindu memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tradisi yang telah berkembang dalam lingkungan masing-masing. Para pengrajin, pedagang, seniman, dan pekerja bangunan turut berperan dalam mempertemukan berbagai unsur kebudayaan tersebut. Dalam prosesnya, unsur budaya yang berasal dari luar tidak selalu diterima secara utuh, tetapi mengalami penyesuaian dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat India. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kebudayaan Mughal tidak hanya ditentukan oleh kebijakan para penguasa, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sosial dan kebudayaan.

Pada masa Jahangir (1605–1627 M), seni lukis dan kebudayaan istana berkembang lebih lanjut. Pemerintahan Shah Jahan (1628–1658 M) dikenal melalui pembangunan arsitektur monumental, termasuk Taj Mahal. Sementara itu, masa Aurangzeb (1658–1707 M) ditandai oleh perluasan wilayah yang besar, tetapi juga menghadapi persoalan politik dan administrasi yang semakin berat. Setelah Aurangzeb wafat, konflik internal dan menguatnya kekuatan regional menyebabkan kekuasaan pusat melemah. Kerajaan Mughal akhirnya kehilangan kekuasaan politiknya setelah pemberontakan India pada 1857 dan pengasingan kaisar terakhir, Bahadur Shah Zafar, oleh pemerintah kolonial Inggris pada 1858.

Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa akulturasi budaya tidak terjadi dalam satu periode yang seragam. Setiap penguasa memiliki kebijakan dan prioritas yang berbeda sehingga bentuk interaksi kebudayaan juga mengalami perubahan. Kemajuan arsitektur, misalnya, sangat menonjol pada masa Shah Jahan, sedangkan perkembangan administrasi dan hubungan dengan kelompok elite lokal memiliki peranan penting pada masa Akbar. Dengan demikian, sejarah Kerajaan Mughal memperlihatkan bahwa perkembangan kebudayaan berkaitan erat dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi kerajaan (Bhargava, 2019).

Menurut penulis, latar belakang akulturasi budaya Mughal dapat dijelaskan melalui dua faktor utama. Pertama, kerajaan berkembang di tengah masyarakat India yang memiliki tradisi kebudayaan yang kuat dan beragam. Kedua, pemerintahan Mughal memiliki hubungan dengan dunia Persia dan Asia Tengah yang membawa tradisi seni, sastra, serta administrasi tersendiri. Pertemuan kedua kondisi tersebut mendorong terbentuknya kebudayaan yang berbeda dari tradisi asalnya. Oleh karena itu, akulturasi pada masa Mughal tidak sekadar menunjukkan percampuran budaya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas peradaban Islam terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan masyarakat setempat.

Proses Akulturasi Budaya Islam, Persia, Asia Tengah, dan India

Akulturasi budaya merupakan proses pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih yang mendorong terjadinya penyesuaian, pertukaran, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses tersebut, unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dapat saling memengaruhi tanpa harus menghilangkan seluruh ciri khas budaya asalnya. Akulturasi tidak selalu berlangsung secara seimbang karena kekuasaan politik, kedudukan sosial, dan kepentingan kelompok tertentu dapat memengaruhi unsur budaya yang lebih dominan. Oleh karena itu, akulturasi perlu dipahami bukan hanya sebagai percampuran budaya, tetapi juga sebagai proses sosial dan historis yang melibatkan hubungan antarkelompok masyarakat.

Pada masa Kerajaan Mughal, akulturasi berkembang melalui interaksi antara tradisi Islam, kebudayaan Persia, warisan Asia Tengah, dan kebudayaan masyarakat India. Dinasti Mughal yang didirikan oleh Babur pada 1526 membawa warisan politik dan kebudayaan dari Asia Tengah. Sementara itu, tradisi Persia memiliki pengaruh kuat dalam bahasa istana, penulisan sejarah, sastra, dan seni. Di sisi lain, masyarakat India telah mempunyai tradisi lokal yang berkembang dalam bidang arsitektur, kerajinan, seni, bahasa, dan kehidupan sosial. Pertemuan berbagai unsur tersebut menjadi salah satu dasar terbentuknya identitas kebudayaan Mughal yang memiliki karakter tersendiri

(Mahendra, 2025).

Proses akulturasi berlangsung melalui berbagai saluran, seperti pemerintahan, perdagangan, perkawinan politik, kegiatan kesenian, pembangunan kota, serta hubungan sehari-hari antara masyarakat yang berbeda latar belakang. Lingkungan istana menjadi salah satu ruang penting dalam proses tersebut karena mempertemukan penguasa, pejabat, penulis, arsitek, seniman, dan pengrajin. Melalui hubungan itu, terjadi pertukaran pengetahuan, teknik, bahasa, dan gaya seni. Meskipun demikian, akulturasi tidak hanya berlangsung di lingkungan kerajaan, tetapi juga berkembang melalui aktivitas masyarakat yang terlibat dalam perdagangan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.

Peran penguasa dapat dilihat melalui karya Abu'l-Fazl, seorang sejarawan istana pada masa Akbar, yang menulis Akbarnāma. Karya tersebut memuat uraian mengenai kehidupan dan pemerintahan Akbar, termasuk kebijakan politik serta hubungan kerajaan dengan berbagai kelompok di wilayah kekuasaannya. Sebagai sumber primer, Akbarnāma membantu peneliti memahami bagaimana pemerintahan Mughal menggambarkan kekuasaan dan kehidupan politik pada masanya. Namun, karena ditulis oleh seorang penulis yang berada di lingkungan istana, isinya tetap perlu dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan sumber sejarah lainnya agar gambaran mengenai masyarakat Mughal tidak hanya bergantung pada sudut pandang penguasa (Abu'l Fazl, 2019).

Salah satu unsur penting dalam kebudayaan Mughal adalah pengaruh Persia. Pengaruh ini terlihat dalam penggunaan bahasa Persia di lingkungan administrasi dan sastra istana, tradisi penulisan sejarah, seni kaligrafi, serta ragam hias bangunan. Bahasa Persia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi kalangan elite, tetapi juga menjadi media penyebaran gagasan dan pencatatan peristiwa kerajaan. Meskipun demikian, pengaruh Persia tidak berarti bahwa kebudayaan Mughal sepenuhnya meniru kebudayaan Persia. Unsur-unsur tersebut mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat India, termasuk ketersediaan bahan bangunan, keterampilan pengrajin lokal, dan tradisi seni yang telah berkembang sebelumnya.

Dalam bidang arsitektur, pertemuan kebudayaan dapat dilihat melalui penggunaan bentuk, teknik, dan ragam hias yang memperlihatkan pengaruh Islam-Persia sekaligus tradisi lokal India. Bangunan Mughal, misalnya, dapat menampilkan kubah, lengkungan, kaligrafi, taman bergaya Persia, serta unsur dekoratif yang disesuaikan dengan keterampilan dan bahan setempat. Perpaduan tersebut menghasilkan gaya arsitektur yang berbeda dari bangunan Persia maupun India yang berkembang secara terpisah. Karena itu, arsitektur Mughal dapat dipahami sebagai hasil interaksi lintas budaya yang melibatkan peran penguasa, arsitek, pengrajin, dan lingkungan tempat bangunan didirikan.

Selain arsitektur, akulturasi juga berkembang dalam seni lukis, sastra, dan tradisi penulisan sejarah. Seni lukis istana Mughal memperlihatkan pertemuan antara teknik dan gaya yang berasal dari tradisi Persia dengan penggambaran manusia, alam, hewan, serta peristiwa yang berkembang di India. Dalam sastra dan penulisan sejarah, tradisi Persia digunakan untuk mencatat kehidupan kerajaan dan menyampaikan gambaran mengenai kekuasaan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Mughal tidak terbentuk melalui penerimaan satu tradisi secara pasif, tetapi melalui proses pemilihan dan penyesuaian berbagai unsur budaya sesuai kebutuhan lingkungan istana dan masyarakat.

Penelitian tentang Dinasti Mughal juga memperlihatkan bahwa perkembangan politik kerajaan berkaitan erat dengan perubahan sosial, seni, dan kebudayaan. Keberhasilan pemerintahan Mughal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan penguasa mengelola wilayah yang memiliki keragaman masyarakat dan tradisi. Namun, hubungan antarkelompok tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Perbedaan kepentingan politik, kebijakan penguasa, dan perubahan kondisi sosial dapat memengaruhi hubungan masyarakat serta keberlangsungan proses pertukaran budaya. Dengan demikian, akulturasi pada masa Mughal perlu dilihat sebagai proses yang dinamis, bukan sebagai keadaan harmonis yang berlangsung sama di setiap masa pemerintahan (Ajmain & Maftuh, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal dapat dipahami sebagai proses kreatif sekaligus politis. Proses ini menghasilkan bentuk kebudayaan yang khas melalui pertemuan tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India. Identitas peradaban Mughal tidak berasal dari satu kebudayaan saja, melainkan terbentuk melalui hubungan antara warisan budaya yang dibawa para penguasa dan tradisi lokal yang telah hidup di masyarakat. Dengan demikian, kekhasan peradaban Mughal terletak pada kemampuannya mengolah berbagai pengaruh budaya menjadi bentuk baru, meskipun proses tersebut tetap dipengaruhi oleh kekuasaan, kondisi sosial, dan kepentingan politik pada zamannya.

Akulturasi Budaya dalam Bidang Arsitektur dan Seni

Arsitektur merupakan salah satu bukti paling nyata dari proses akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal. Bangunan-bangunan yang didirikan pada masa ini memperlihatkan pertemuan antara tradisi arsitektur Islam, pengaruh Persia, warisan Asia Tengah, dan keterampilan lokal masyarakat India. Perpaduan tersebut terlihat melalui penggunaan kubah, lengkungan, taman, kaligrafi, pola geometris, serta penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan dan simetri.

Namun, karakter arsitektur Mughal tidak terbentuk hanya melalui peniruan gaya dari luar. Ketersediaan bahan bangunan, kondisi lingkungan, keterampilan pengrajin, dan kebutuhan kerajaan turut menentukan bentuk akhir bangunan yang dihasilkan. Dengan demikian, arsitektur Mughal dapat dipahami sebagai hasil penyesuaian berbagai tradisi budaya yang berkembang dalam satu lingkungan politik dan sosial (Harahab, 2024).

Salah satu peninggalan arsitektur Mughal yang paling terkenal adalah Taj Mahal, yang dibangun atas perintah Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Bangunan ini memperlihatkan penggunaan marmer putih, kaligrafi, ornamen dekoratif, komposisi simetris, dan taman yang ditata secara teratur. Unsur-unsur tersebut tidak hanya menunjukkan keindahan visual, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan spiritualitas, penghormatan, dan gagasan tentang keindahan dalam tradisi Islam. Pembangunannya melibatkan berbagai tenaga ahli dan pengrajin sehingga Taj Mahal menjadi contoh bagaimana keterampilan yang berasal dari beragam lingkungan budaya dapat dipadukan menjadi sebuah karya arsitektur yang khas. Oleh sebab itu, Taj Mahal tidak hanya penting sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai bukti perkembangan seni dan peradaban Mughal (Wulandari et al., 2025).

Selain Taj Mahal, kompleks Fatehpur Sikri yang dikembangkan pada masa Akbar memperlihatkan hubungan erat antara arsitektur, kehidupan istana, dan pemerintahan. Kompleks ini mencakup berbagai bangunan dengan fungsi berbeda, seperti masjid, ruang pertemuan, tempat kegiatan pemerintahan, dan kawasan pasar. Keberagaman fungsi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota kerajaan tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang indah, tetapi juga mendukung kegiatan administratif dan kehidupan sosial. Bentuk bangunannya memperlihatkan pertemuan unsur arsitektur Islam-Persia dengan tradisi lokal India. Dengan demikian, Fatehpur Sikri dapat dipahami sebagai ruang yang merepresentasikan identitas politik dan kebudayaan Mughal sekaligus memperlihatkan bagaimana berbagai tradisi arsitektur disesuaikan dengan kebutuhan kerajaan (Mahendra, 2025).

Pengaruh Persia juga memiliki peranan penting dalam perkembangan arsitektur Mughal. Pengaruh tersebut dapat ditemukan dalam perancangan taman, penggunaan ruang, komposisi bangunan, serta penerapan ragam hias tertentu. Akan tetapi, ketika diterapkan di India, unsur-unsur tersebut mengalami penyesuaian dengan lingkungan setempat. Bahan bangunan yang tersedia, teknik konstruksi yang dikuasai pengrajin lokal, dan tradisi arsitektur yang telah berkembang sebelumnya turut membentuk karakter bangunan Mughal. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan budaya Persia dan India tidak berlangsung satu arah. Tradisi yang dibawa dari luar berinteraksi dengan pengetahuan

lokal, sehingga menghasilkan bentuk arsitektur yang memiliki ciri khas tersendiri.

Proses akulturasi juga terlihat dalam seni lukis Mughal, terutama melalui perkembangan seni miniatur di lingkungan istana. Tradisi seni lukis Persia memberikan pengaruh terhadap teknik ilustrasi, komposisi gambar, penggunaan warna, dan penggambaran tokoh. Dalam perkembangannya, para seniman Mughal mengolah pengaruh tersebut untuk menggambarkan kehidupan istana, kegiatan perburuan, tumbuhan, hewan, peperangan, dan berbagai peristiwa sejarah. Penggambaran lingkungan India serta kehidupan masyarakat setempat memperlihatkan bahwa seni lukis Mughal tidak hanya mempertahankan gaya yang diwarisi dari Persia, tetapi juga mengembangkan ciri visual sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan kerajaan. Proses tersebut menghasilkan tradisi seni yang memperlihatkan hubungan antara warisan budaya asing dan kreativitas seniman lokal.

Perkembangan seni lukis tidak dapat dipisahkan dari dukungan penguasa dan kehidupan istana. Para seniman memperoleh kesempatan untuk menghasilkan karya melalui kegiatan yang didukung oleh kerajaan. Lingkungan tersebut memungkinkan seniman dengan latar belakang dan keterampilan berbeda untuk berinteraksi, bertukar teknik, serta mengembangkan gaya baru. Karya seni kemudian tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menggambarkan kekuasaan, mencatat peristiwa, dan memperlihatkan kehidupan kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa seni dalam peradaban Mughal berkaitan erat dengan hubungan antara kreativitas, patronase penguasa, dan kepentingan politik.

Selain arsitektur dan seni lukis, akulturasi juga berkembang dalam bidang kerajinan, seperti tekstil, perhiasan, ukiran, kaligrafi, dan dekorasi bangunan. Berbagai hasil kerajinan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan istana, kegiatan keagamaan, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Keterlibatan pengrajin dari berbagai latar belakang memungkinkan terjadinya pertukaran teknik dan keterampilan. Dalam prosesnya, unsur budaya yang berbeda dapat dipadukan atau disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Meskipun tidak seluruh produk kerajinan dapat dikaitkan langsung dengan kebijakan kerajaan, keberadaannya menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Mughal tidak hanya bergantung pada penguasa, tetapi juga pada keterampilan dan kreativitas masyarakat (Harahab, 2024).

Secara historis, pertemuan Islam dan kebudayaan India turut membentuk perkembangan seni dan arsitektur di wilayah kekuasaan Mughal. Interaksi tersebut tidak selalu menghasilkan bentuk budaya yang sama di setiap tempat, sebab penerimaan dan penyesuaian unsur budaya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, kebijakan penguasa, dan tradisi lokal yang telah berkembang. Oleh karena itu, akulturasi perlu dipahami sebagai proses yang dinamis, yaitu ketika berbagai unsur budaya saling

berinteraksi dan menghasilkan bentuk baru tanpa harus menghapus seluruh ciri asalnya (Faidi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, arsitektur dan seni merupakan bukti penting bahwa akulturasi dapat membentuk identitas peradaban yang khas. Dalam kasus Kerajaan Mughal, identitas tersebut terbentuk melalui pertemuan tradisi Islam, Persia, Asia Tengah, dan India dalam berbagai karya budaya. Taj Mahal memperlihatkan perpaduan unsur arsitektur dan simbolisme, Fatehpur Sikri menunjukkan hubungan antara bentuk bangunan dan kehidupan politik, sedangkan seni lukis serta kerajinan memperlihatkan kreativitas para seniman dan pengrajin. Dengan demikian, keistimewaan seni dan arsitektur Mughal terletak pada kemampuannya mengolah berbagai pengaruh menjadi karya baru yang mencerminkan kondisi sejarah dan kebudayaan masyarakat pada zamannya.

Akulturasi Budaya dalam bidang Bahasa, Sastra, dan Ilmu Pengetahuan

Bahasa memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban karena menjadi sarana komunikasi, penyebaran pengetahuan, dan pembentukan identitas sosial. Pada masa Kerajaan Mughal, bahasa Persia digunakan secara luas dalam lingkungan administrasi dan kebudayaan istana. Kedudukan bahasa Persia berkaitan dengan tradisi pemerintahan, kesusastraan, dan penulisan sejarah yang berkembang di dunia Persia dan Asia Tengah. Bahasa tersebut digunakan dalam korespondensi resmi, pencatatan pemerintahan, karya sastra, serta penulisan peristiwa kerajaan. Penggunaan bahasa Persia memperlihatkan bahwa kebudayaan yang dibawa oleh penguasa Mughal turut membentuk sistem komunikasi kaum elite, meskipun masyarakat India tetap menggunakan berbagai bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan bahasa Persia tidak berarti bahwa bahasa-bahasa lokal kehilangan perannya. India merupakan kawasan dengan keragaman bahasa yang telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Mughal. Bahasa-bahasa lokal tetap digunakan dalam kegiatan perdagangan, hubungan keluarga, kehidupan sosial, dan penyampaian tradisi masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara bahasa yang dominan dalam lingkungan pemerintahan dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat luas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa identitas kebahasaan Mughal terbentuk melalui hubungan antara bahasa istana dan bahasa masyarakat, bukan melalui penggantian seluruh bahasa lokal dengan bahasa Persia (Suwarno, 2018).

Salah satu sumber penting untuk memahami penggunaan bahasa dan tradisi penulisan pada masa Akbar adalah Akbarnāma dan Ain-i-Akbari, yang ditulis oleh Abu'l-Fazl. Akbarnāma menyajikan sejarah pemerintahan Akbar, sedangkan Ain-i-Akbari memuat informasi mengenai administrasi kerajaan, organisasi pemerintahan, kehidupan istana, dan berbagai aspek masyarakat.

Kedua karya tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dan tulisan berperan penting dalam mendokumentasikan kekuasaan serta menyusun gambaran mengenai pemerintahan Mughal. Namun, keduanya perlu dibaca secara kritis karena ditulis oleh seorang tokoh yang berada dekat dengan penguasa. Oleh sebab itu, informasi di dalamnya perlu dibandingkan dengan sumber lain agar peneliti dapat membedakan catatan administratif, gambaran ideal mengenai raja, dan kondisi masyarakat yang sebenarnya (Abu'l-Falz, 2020).

Selain dalam pemerintahan, akulturasi bahasa juga berlangsung melalui kegiatan penerjemahan. Pada masa Akbar, sejumlah karya dari tradisi India diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Salah satu contohnya adalah Mahabharata, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dengan judul Razmnāma. Kegiatan penerjemahan ini memperlihatkan adanya upaya untuk memperkenalkan pengetahuan dan tradisi sastra dari lingkungan kebudayaan yang berbeda kepada kalangan istana Mughal. Proses tersebut bukan hanya memindahkan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan juga menuntut penafsiran terhadap istilah, gagasan, tokoh, dan nilai yang terkandung dalam karya aslinya. Karena itu, penerjemahan menjadi salah satu saluran penting dalam pertukaran kebudayaan antara tradisi Persia-Islam dan India.

Dalam bidang sastra, bahasa Persia menjadi media untuk mengembangkan puisi, penulisan sejarah, biografi, dan karya yang berkaitan dengan kehidupan istana. Karya sastra dapat berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga digunakan untuk menyampaikan pandangan tentang kepemimpinan, mencatat peristiwa politik, dan membangun ingatan kolektif mengenai kerajaan. Penulisan sejarah, misalnya, tidak hanya menyimpan informasi mengenai masa lalu, tetapi juga dapat membentuk cara generasi berikutnya memahami penguasa dan pemerintahannya. Oleh karena itu, karya sastra dan sejarah pada masa Mughal perlu dipahami sebagai produk kebudayaan yang memiliki nilai estetika sekaligus berkaitan dengan kepentingan politik.

Akulturasi dalam bidang bahasa dan sastra juga dapat dilihat melalui hubungan antara tradisi istana dengan perkembangan bahasa lokal. Interaksi antara masyarakat yang menggunakan bahasa berbeda membuka kesempatan bagi pertukaran kosakata, ungkapan, dan cara berkomunikasi. Perdagangan, kegiatan militer, perpindahan penduduk, dan pertumbuhan kota menjadi beberapa lingkungan yang memungkinkan pertemuan tersebut berlangsung. Perkembangan bahasa Hindustani, misalnya, merupakan proses historis panjang yang melibatkan berbagai bahasa dan komunitas di anak benua India. Karena itu, perkembangannya tidak tepat jika hanya dikaitkan dengan satu penguasa atau satu periode pemerintahan. Hubungan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat turut berperan dalam membentuk dan mengubah bahasa dari waktu ke waktu.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Mughal juga perlu dikaji berdasarkan bukti sejarah yang tersedia. Kerajaan ini memiliki kegiatan intelektual dalam bidang administrasi, sejarah, sastra, pendidikan, dan pemikiran keagamaan. Karya seperti Ain-i-Akbari menunjukkan adanya pengetahuan yang cukup terperinci mengenai organisasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan kehidupan kerajaan. Pengetahuan tersebut penting karena membantu menjelaskan bagaimana pemerintahan mengumpulkan informasi untuk mengatur wilayah yang luas. Namun, keberadaan karya administratif tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sama. Penilaian yang seimbang harus memperhatikan jenis pengetahuan yang berkembang, tokoh yang terlibat, lembaga pendukung, serta karya yang benar-benar dihasilkan (Riyadi, 2019).

Pertemuan tradisi Islam, Persia, dan India juga membuka ruang bagi pertukaran gagasan dalam lingkungan istana. Kebijakan penerjemahan pada masa Akbar merupakan salah satu contoh bagaimana penguasa dapat mendukung perjumpaan antara tradisi intelektual yang berbeda. Melalui kegiatan tersebut, karya dari lingkungan kebudayaan India dapat diperkenalkan kepada pembaca yang menggunakan bahasa Persia. Di sisi lain, pengetahuan yang berasal dari tradisi Persia-Islam juga berkembang dalam lingkungan masyarakat India. Pertukaran ini tidak berarti bahwa seluruh perbedaan pemikiran menghilang. Sebaliknya, proses tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pengetahuan berlangsung melalui pemilihan, penerjemahan, penafsiran, dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat serta lingkungan kerajaan.

Menurut penulis, perkembangan bahasa, sastra, dan ilmu pengetahuan memperlihatkan bahwa akulturasi budaya pada masa Mughal tidak hanya menghasilkan bangunan atau karya seni, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat mencatat sejarah, menyampaikan gagasan, dan mengelola pemerintahan. Bahasa Persia memperoleh kedudukan penting di lingkungan istana, sementara bahasa-bahasa lokal tetap berperan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi penerjemahan memperlihatkan hubungan antara kebudayaan Persia-Islam dan India, sedangkan karya sejarah serta administrasi menunjukkan penggunaan tulisan sebagai sarana pemerintahan. Dengan demikian, identitas intelektual Mughal terbentuk melalui interaksi berbagai tradisi, meskipun tingkat perkembangan dan jangkauan pengaruhnya berbeda-beda dalam setiap bidang.

Akulturasi Budaya dalam Bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Kehidupan Sosial

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam perkembangan peradaban karena menjadi sarana penyebaran pengetahuan, pembentukan nilai, dan pewarisan kebudayaan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Pada masa Kerajaan Mughal, pendidikan berkembang melalui beragam lingkungan, seperti masjid, maktab, madrasah, lingkungan istana, serta hubungan antara guru dan murid. Di samping pendidikan Islam, masyarakat India juga memiliki tradisi pembelajaran yang berkembang dalam lingkungan Hindu dan komunitas lainnya. Keberadaan beragam tradisi pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan intelektual di wilayah Mughal tidak hanya dipengaruhi oleh satu kelompok kebudayaan. Meskipun demikian, keberadaan berbagai tradisi pendidikan tidak otomatis menunjukkan terjadinya akulturasi. Akulturasi dapat dikatakan berlangsung apabila terdapat bukti interaksi, pertukaran pengetahuan, atau penyesuaian antara tradisi yang berbeda.

Pendidikan Islam pada masa Mughal memiliki peranan dalam mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa Arab, dan berbagai cabang ilmu keagamaan. Pada saat yang sama, kebutuhan pemerintahan terhadap pejabat, penulis, dan administrator mendorong pentingnya kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta memahami bahasa Persia yang digunakan dalam administrasi kerajaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembentukan pengetahuan keagamaan, tetapi juga mendukung kebutuhan praktis pemerintahan. Perbedaan tujuan pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Mughal memiliki beberapa fungsi, mulai dari pewarisan ajaran agama hingga penyiapan tenaga yang mampu menjalankan urusan kerajaan.

Perhatian penguasa terhadap pendidikan juga terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan tertentu. Pendidikan di lingkungan kerajaan tidak hanya mencakup pengetahuan tertulis, tetapi juga latihan fisik dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas militer. Kajian Ashraf mengenai pendidikan dan pelatihan memanah di India Mughal menunjukkan bahwa latihan keterampilan merupakan salah satu bagian dari pendidikan pada masa tersebut. Hal ini memperluas pemahaman mengenai pendidikan Mughal karena kegiatan belajar tidak terbatas pada madrasah atau pembelajaran keagamaan, tetapi juga mencakup keterampilan praktis yang dianggap penting bagi kehidupan kerajaan dan masyarakat (Ashraf, 2025).

Dari sudut pandang akulturasi, pendidikan menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan pengetahuan dari tradisi yang berbeda. Hubungan antara lingkungan istana, ulama, penulis, dan kelompok masyarakat lainnya dapat membuka kesempatan bagi pertukaran gagasan serta keterampilan. Namun, proses tersebut perlu dijelaskan berdasarkan bukti sejarah yang konkret, misalnya kegiatan penerjemahan, keterlibatan cendekiawan dari latar belakang berbeda, atau penggunaan pengetahuan tertentu dalam lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan pada masa Mughal sebaiknya tidak hanya dinilai dari banyaknya lembaga yang berdiri,

tetapi juga dari jenis pengetahuan yang diajarkan, kelompok yang memperoleh akses pendidikan, dan bentuk hubungan antarkebudayaan yang dapat dibuktikan. Kajian mengenai transformasi sosial dan pendidikan Islam pada era Mughal dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami hubungan antara pendidikan dan perubahan masyarakat India (Sarmin & Toedien, 2026).

Dalam bidang pemerintahan, Kerajaan Mughal mengembangkan sistem administrasi untuk mengelola wilayah yang luas dengan penduduk yang memiliki latar belakang agama, bahasa, dan kebudayaan yang beragam. Pemerintahan memerlukan mekanisme pengelolaan pendapatan, penataan wilayah, pengaturan militer, serta hubungan antara penguasa pusat dan para pejabat daerah. Pelaksanaan administrasi tersebut melibatkan berbagai kelompok elite yang memiliki kemampuan dan kepentingan berbeda. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Mughal tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem kekuasaan yang dibawa oleh penguasa Muslim, tetapi juga sebagai pemerintahan yang berinteraksi dengan struktur sosial dan politik masyarakat India. Catatan administratif dalam Ain-i-Akbari, karya Abu'l-Fazl, menjadi salah satu sumber primer yang dapat membantu peneliti memahami organisasi pemerintahan dan sejumlah aspek kehidupan kerajaan pada masa Akbar (Abu’l-Falz, 2020).

Salah satu contoh hubungan antara pemerintahan dan akulturasi adalah kebijakan Akbar dalam menjalin hubungan politik dengan kelompok Rajput. Hubungan tersebut meliputi kerja sama dengan sejumlah penguasa lokal, perkawinan politik dalam kasus tertentu, serta keterlibatan sebagian elite Rajput dalam struktur kekuasaan Mughal. Kerja sama ini membantu memperluas dukungan politik kerajaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan kelompok elite setempat. Di sisi lain, hubungan tersebut juga mempertemukan orang-orang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda dalam lingkungan pemerintahan dan istana. Meskipun demikian, hubungan Mughal dengan Rajput tidak selalu berlangsung dalam bentuk kerja sama karena terdapat pula konflik dan perlawanan. Oleh sebab itu, kebijakan Akbar perlu dipahami sebagai strategi politik yang memiliki dampak terhadap hubungan sosial dan kebudayaan, bukan semata-mata sebagai upaya menyatukan semua kelompok.

Akulturasi dalam pemerintahan juga dapat dilihat melalui penyesuaian sistem kekuasaan dengan keadaan masyarakat setempat. Untuk mengelola wilayah yang beragam, penguasa Mughal perlu berhubungan dengan elite lokal yang memahami kondisi daerah, masyarakat, dan sumber daya yang tersedia. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya perpaduan antara kebijakan kerajaan dan praktik pemerintahan lokal, meskipun bentuk penyesuaiannya tidak selalu sama di setiap wilayah. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintahan Mughal berkembang melalui hubungan timbal balik

antara kekuasaan pusat dan masyarakat yang diperintah. Dengan demikian, akulturasi tidak selalu berarti pencampuran unsur kebudayaan secara langsung, tetapi dapat pula berlangsung melalui penyesuaian lembaga, pola kerja sama, dan praktik administrasi.

Dalam perspektif sejarah peradaban Islam, perkembangan pemerintahan dan kehidupan masyarakat perlu dipahami sebagai bagian dari hubungan antara kekuasaan, kebudayaan, dan kondisi sosial pada zamannya. Kerajaan Mughal tidak hanya mewarisi tradisi pemerintahan Islam, tetapi juga berhadapan dengan lingkungan masyarakat India yang memiliki struktur sosial dan kebudayaan tersendiri. Pertemuan tersebut mendorong terjadinya penyesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perkembangan peradaban Mughal dapat dikaji melalui hubungan antara dinamika politik dan perubahan sosial, bukan hanya berdasarkan pergantian penguasa atau perluasan wilayah. Pendekatan sejarah peradaban membantu menempatkan perkembangan kerajaan Islam dalam konteks masyarakat yang lebih luas (Pulungan, 2018).

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Mughal terdiri atas berbagai kelompok agama dan kebudayaan yang berinteraksi melalui perdagangan, kegiatan kerajinan, pertanian, kehidupan perkotaan, dan hubungan antarkomunitas. Pasar dan pusat perdagangan menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan bahasa serta kebiasaan berbeda. Para pedagang, pengrajin, pekerja, dan pejabat dapat saling bertukar keterampilan, istilah, serta kebiasaan melalui kegiatan sehari-hari. Interaksi semacam ini menjadi salah satu jalur yang memungkinkan terjadinya perubahan budaya di luar lingkungan istana. Berbeda dengan kebijakan resmi penguasa, akulturasi sosial dapat berlangsung secara bertahap melalui hubungan yang berulang dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun demikian, hubungan antarkelompok pada masa Mughal tidak selalu berjalan harmonis atau setara. Perbedaan kedudukan sosial, kekayaan, agama, dan akses terhadap kekuasaan dapat memengaruhi cara masyarakat berinteraksi. Sebagian kelompok memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki lingkungan pemerintahan dan memperoleh pendidikan, sedangkan kelompok lainnya mungkin memiliki akses yang lebih terbatas. Karena itu, pembahasan tentang akulturasi perlu memperhatikan bukan hanya bentuk kebudayaan yang muncul dari interaksi, tetapi juga kondisi sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan tersebut membantu menghindari anggapan bahwa pertemuan kebudayaan selalu menghasilkan hubungan yang damai dan menguntungkan seluruh kelompok masyarakat secara merata.

Menurut penulis, akulturasi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sosial memperlihatkan bahwa pembentukan peradaban Mughal tidak hanya berlangsung melalui kebijakan

raja atau kegiatan di lingkungan istana. Pendidikan berperan dalam menyebarkan pengetahuan dan menyiapkan tenaga yang dibutuhkan masyarakat maupun pemerintahan. Hubungan politik antara penguasa Mughal dan elite lokal menunjukkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan wilayah yang beragam, sedangkan perdagangan dan kehidupan sehari-hari membuka ruang bagi pertukaran kebiasaan serta keterampilan. Ketiga bidang tersebut saling berkaitan dalam membentuk kehidupan masyarakat Mughal. Dengan demikian, identitas peradaban Mughal dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tradisi Islam, kebudayaan Persia, warisan Asia Tengah, dan kebudayaan masyarakat India. Proses ini berlangsung secara beragam, bergantung pada wilayah, periode pemerintahan, dan kelompok masyarakat yang terlibat.

Akulturasi Budaya sebagai Identitas Peradaban Islam pada Masa Kerajaan Mughal

Identitas peradaban merupakan ciri khas yang terbentuk melalui perjalanan sejarah dan membedakan suatu masyarakat dari masyarakat lainnya. Identitas tersebut tidak selalu bersifat tetap, tetapi dapat mengalami perubahan melalui interaksi sosial, perkembangan politik, pertukaran pengetahuan, dan hubungan antarkelompok masyarakat. Dalam sejarah Kerajaan Mughal di India, identitas peradaban Islam berkembang melalui pertemuan tradisi Islam dengan kebudayaan Persia, Asia Tengah, dan India. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai bentuk kebudayaan yang tampak dalam arsitektur, seni, sastra, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, akulturasi budaya dapat dipahami sebagai salah satu proses penting dalam pembentukan identitas peradaban Mughal, karena kerajaan tersebut berkembang dalam lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam (Anwar et al., 2025).

Dalam bidang arsitektur, identitas peradaban Mughal terlihat melalui perpaduan unsur Islam, Persia, Asia Tengah, dan India. Perpaduan tersebut dapat diamati pada Taj Mahal dan berbagai bangunan bersejarah lainnya yang memperlihatkan penggunaan kubah, kaligrafi, taman, ornamen, serta tata ruang yang memiliki karakter khas. Bangunan-bangunan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan atau kepentingan kerajaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menampilkan kewibawaan penguasa dan perkembangan seni pada zamannya. Arsitektur Mughal menunjukkan bahwa pengaruh budaya yang berbeda dapat diolah menjadi bentuk baru tanpa harus menghilangkan seluruh ciri kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, peninggalan arsitektur Mughal merupakan bukti penting bahwa akulturasi berperan dalam membentuk identitas peradaban Islam di India.

Dalam bidang seni dan sastra, identitas peradaban Mughal berkembang melalui seni lukis,

penulisan sejarah, kesusastraan, dan penggunaan bahasa Persia dalam lingkungan istana. Pengaruh Persia memberikan sumbangan besar terhadap tradisi penulisan dan administrasi kerajaan, sedangkan lingkungan India turut memengaruhi tema, bentuk, dan gaya ekspresi seni. Pertemuan tersebut menghasilkan karya-karya yang memiliki karakter khas Mughal. Perkembangan seni dan sastra juga memperlihatkan bahwa kebudayaan tidak hanya terbentuk melalui kebijakan penguasa, tetapi turut berkembang melalui kreativitas seniman, penulis, dan masyarakat yang hidup di lingkungan kerajaan. Oleh sebab itu, identitas peradaban Mughal tidak tepat dipahami hanya sebagai kelanjutan kebudayaan Persia atau India, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai tradisi dalam konteks sejarah yang berbeda (Anwar et al., 2025).

Akulturasi budaya juga dapat ditelaah melalui kebijakan pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Kerajaan Mughal memerintah wilayah yang dihuni oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, bahasa, dan kebiasaan yang beragam. Kondisi tersebut membuat penguasa perlu membangun hubungan politik dengan berbagai kelompok lokal untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. Pada masa Akbar, misalnya, hubungan dengan sejumlah penguasa Rajput menjadi bagian penting dari strategi politik kerajaan. Namun, hubungan tersebut tidak semata-mata menunjukkan penerimaan budaya, sebab kerja sama politik juga dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan kebutuhan administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan identitas peradaban Mughal berlangsung melalui hubungan antara kebudayaan dan politik, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam analisis sejarah (Ajmain & Maftuh., 2026).

Proses akulturasi pada masa Mughal tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang selalu harmonis. Kebijakan para penguasa terhadap kelompok agama dan kebudayaan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan pemerintahan dan situasi politik. Perbedaan tersebut terlihat melalui dua model kebijakan, yaitu model inklusif-sinkretis pada masa Sultan Akbar dan model pemurnian-ortodoksi pada masa Aurangzeb Alamgir. Kedua model ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara Islam, kebudayaan lokal, dan kekuasaan kerajaan.

1. Model Inklusif-Sinkretis pada Masa Sultan Akbar (1556–1605 M)

Sultan Akbar menerapkan kebijakan yang menekankan keterbukaan dan toleransi terhadap masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan budaya. Melalui prinsip *Sulh-i-Kul* atau perdamaian universal, Akbar berusaha membangun hubungan yang harmonis di antara kelompok masyarakat. Ia juga menghapus jizyah dan menjalin hubungan politik dengan kelompok Rajput, termasuk melalui pernikahan. Selain itu, Akbar membentuk Ibadat Khana sebagai tempat diskusi lintas agama. Ia juga memperkenalkan Din-i-Ilahi sebagai gagasan yang menggabungkan unsur keagamaan dan etika,

meskipun gagasan tersebut tidak mendapat dukungan luas.

Kebijakan Akbar menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap kelompok yang berbeda dapat menjadi strategi untuk membangun hubungan politik dan memperkuat pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut juga mendapat kritik dari kalangan ulama. Abd al-Qadir Badauni mengkritik sejumlah kebijakan keagamaan Akbar, sedangkan Syekh Ahmad Sirhindi mendorong penguatan kembali ajaran dan identitas Islam. Kritik tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan Akbar tidak sepenuhnya diterima oleh semua kalangan Muslim. Dengan demikian, model Akbar menunjukkan bahwa akulturasi dapat mendorong hubungan antarkelompok, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara keterbukaan budaya dan ajaran agama.

2. Model Pemurnian-Ortodoksi pada Masa Aurangzeb Alamgir (1658–1707 M)

Berbeda dengan Akbar, Aurangzeb lebih menekankan penguatan ajaran dan hukum Islam dalam pemerintahan. Ia memberlakukan kembali jizyah pada tahun 1679, mendukung penyusunan *Fatawa-i-Alamgiri* sebagai kumpulan hukum Islam, serta mengurangi dukungan terhadap seni lukis istana yang menggambarkan makhluk hidup. Kebijakan ini memperlihatkan usaha Aurangzeb untuk memperkuat identitas Islam melalui penerapan hukum dan nilai-nilai keagamaan.

Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan ketegangan politik dengan sejumlah kelompok, termasuk Rajput dan Maratha. Dengan demikian, penguatan identitas Islam pada masa Aurangzeb tidak selalu menghasilkan hubungan sosial dan politik yang harmonis. Ketegangan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan keagamaan dalam kekaisaran yang beragam dapat memengaruhi hubungan antara penguasa dan kelompok masyarakat.

Perbedaan kebijakan Akbar dan Aurangzeb memperlihatkan bahwa akulturasi budaya pada masa Mughal merupakan proses yang dinamis. Akbar menekankan keterbukaan terhadap perbedaan budaya, sedangkan Aurangzeb lebih menekankan pemurnian dan penguatan hukum Islam. Dialektika kedua model tersebut menunjukkan bahwa identitas peradaban Mughal terbentuk melalui tarik-menarik antara kebutuhan hidup dalam masyarakat yang beragam dan keinginan untuk menjaga kemurnian ajaran agama.

Dengan demikian, akulturasi budaya pada masa Mughal tidak hanya menghasilkan perpaduan budaya dalam bidang arsitektur, seni, sastra, dan kehidupan sosial, tetapi juga memperlihatkan perbedaan pandangan dalam menentukan hubungan antara Islam dan kebudayaan lokal. Perbedaan kebijakan Akbar dan Aurangzeb menjadi bukti bahwa pembentukan identitas peradaban Mughal berlangsung melalui proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika politik, agama, serta kondisi masyarakat.

Sumber primer dapat membantu menjelaskan bagaimana penguasa dan penulis pada masa Mughal memandang kerajaan serta masyarakat di sekitarnya. Salah satu sumber yang dapat digunakan adalah Tuzuk-i-Jahangiri, yaitu memoar Jahangir yang memuat catatan mengenai pengalaman pemerintahan dan berbagai pengamatannya. Sumber ini berguna untuk menelaah kehidupan istana, perhatian penguasa terhadap lingkungan, serta gambaran kebudayaan pada masa Jahangir. Akan tetapi, memoar tersebut mencerminkan sudut pandang penguasa sehingga tidak dapat dianggap mewakili seluruh pengalaman masyarakat Mughal. Oleh karena itu, informasi di dalamnya perlu dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan sumber sejarah lainnya agar penjelasan mengenai identitas budaya tidak hanya didasarkan pada pandangan elite kerajaan (Jahangir, 2025).

Sumber primer lain yang relevan adalah Muntakhab-ut-Tawarikh karya Abd al-Qadir Badauni. Karya ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai pemerintahan Akbar dan perkembangan kehidupan keagamaan pada masa tersebut. Jika dibandingkan dengan tulisan resmi istana, sumber ini dapat membantu peneliti melihat bahwa kebijakan penguasa tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh semua kalangan. Perbedaan pandangan tersebut penting dalam mengkaji akulturasi budaya karena menunjukkan bahwa interaksi antara Islam, kebudayaan lokal, dan kebijakan kerajaan dapat menimbulkan penerimaan sekaligus kritik. Dengan membandingkan beberapa sumber, penelitian sejarah dapat menghasilkan pemahaman yang lebih seimbang mengenai perkembangan peradaban Mughal dan tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang (Badauni, 2025).

Meskipun akulturasi menjadi unsur penting dalam pembentukan identitas Mughal, proses tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebudayaan bercampur secara merata atau kehilangan ciri asalnya. Sebagian unsur budaya tetap mempertahankan karakter awalnya, sedangkan unsur lain mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan bentuk arsitektur, bahasa, pakaian, atau seni yang berasal dari kebudayaan tertentu juga tidak secara otomatis menunjukkan perubahan terhadap ajaran agama. Identitas budaya dan identitas ajaran agama merupakan dua hal yang saling berhubungan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akulturasi perlu membedakan antara pengaruh kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan prinsip-prinsip keagamaan yang menjadi pedoman umat Islam.

Selain itu, akulturasi tidak dapat dijadikan bukti bahwa semua kelompok masyarakat pada masa Mughal selalu hidup dalam keadaan harmonis. Sejarah kerajaan tersebut memperlihatkan adanya perubahan kebijakan, persaingan kepentingan, dan ketegangan sosial. Kebijakan yang diterapkan oleh seorang penguasa tidak selalu dilanjutkan dengan cara yang sama oleh penguasa berikutnya. Karena itu, pencapaian dalam bidang seni, arsitektur, dan pemerintahan tidak cukup dijadikan satu-

satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan antaragama pada masa Mughal selalu berlangsung damai. Penilaian sejarah perlu mempertimbangkan kebijakan politik, kondisi sosial, dan pengalaman berbagai kelompok masyarakat. Kajian mengenai kejayaan dan kemunduran Mughal dapat membantu menempatkan pencapaian kebudayaan tersebut dalam konteks sejarah yang lebih luas (Inayah & Kurniawan, 2024).

Menurut penulis, akulturasi merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas peradaban Mughal karena memungkinkan tradisi Islam berkembang dalam lingkungan budaya India melalui interaksi yang berlangsung dalam waktu panjang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan karya seni dan arsitektur, tetapi juga memengaruhi kehidupan politik, sastra, dan hubungan sosial. Namun, akulturasi bukanlah proses yang berlangsung secara otomatis tanpa konflik. Perkembangannya dipengaruhi oleh kebijakan penguasa, kebutuhan masyarakat, kepentingan politik, dan kondisi sosial pada setiap periode. Oleh sebab itu, identitas peradaban Mughal lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai kelompok dan tradisi kebudayaan, bukan sebagai hasil dari satu kelompok masyarakat saja.

Dengan demikian, akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal menunjukkan bahwa perkembangan peradaban Islam dapat berlangsung melalui hubungan dengan masyarakat yang memiliki tradisi berbeda. Pengalaman sejarah tersebut tercermin dalam arsitektur, seni, sastra, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Meskipun demikian, akulturasi perlu dikaji secara kritis dengan memperhatikan perbedaan antara kebudayaan dan ajaran agama serta mempertimbangkan adanya ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman Mughal memberikan pelajaran bahwa identitas peradaban terbentuk melalui proses sejarah yang dinamis, ketika tradisi yang diwariskan berinteraksi dengan kondisi baru dan menghasilkan bentuk kebudayaan yang khas.

Relevansi Akulturasi Budaya pada Masa Kerajaan Mughal

Akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal memiliki relevansi penting bagi kehidupan masyarakat masa kini, khususnya dalam memahami hubungan antara agama dan kebudayaan. Pengalaman sejarah Mughal menunjukkan bahwa peradaban Islam dapat berkembang melalui interaksi dengan kebudayaan lain, seperti Persia, Asia Tengah, dan India. Interaksi tersebut menghasilkan perkembangan dalam bidang arsitektur, seni, sastra, dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap kebudayaan lain dapat memperkaya peradaban tanpa harus menghilangkan identitas keislaman.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran dalam menyikapi

hubungan antara Islam dan tradisi lokal. Masyarakat perlu menghargai keberagaman budaya sekaligus mengkaji tradisi secara kritis berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, sejarah Mughal mengajarkan bahwa keberagaman tidak selalu menghasilkan keharmonisan secara otomatis, tetapi membutuhkan sikap saling menghormati, keadilan, dan kerja sama.

Dengan demikian, akulturasi budaya pada masa Mughal relevan untuk memperkuat pemahaman sejarah Islam, menumbuhkan sikap toleran, serta membangun kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa identitas keislaman dapat tetap dipertahankan sambil mengambil manfaat dari kebudayaan lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tabel 1. *Matriks Akulturasi Budaya sebagai Identitas Peradaban Islam pada Masa Kerajaan Mughal*

Bidang Akulturusi	**Contoh Sejarah**	**Unsur Budaya yang Berinteraksi**	**Pengaruh terhadap Identitas Peradaban**
Arsitektur	Taj Mahal dan Fatehpur Sikri.	Islam, Persia, dan India.	Menghasilkan gaya arsitektur Mughal yang khas.
Seni dan Sastra	Lukisan miniatur dan karya sastra istana.	Tradisi seni Persia dan India serta pengaruh Islam.	Perpaduan tradisi seni Persia, India, dan Islam| Memperkaya seni serta sastra pada masa Kerajaan Mughal.
Bahasa dan pengetahuan	Penggunaan bahasa Persia dalam administrasi dan kesusastraan	Tradisi Persia dan lingkungan masyarakat India	Mendukung perkembangan administrasi dan pertukaran pengetahuan.
Pemerintah	Kerja sama politik Akbar dengan penguasa Rajput	Tradisi pemerintahan Mughal dan	Membentuk pola pemerintahan yang menyesuaikan kondisi

		struktur politik lokal	masyarakat setempat.
Pendidikan	Pembelajaran agama dan pengetahuan di lingkungan masyarakat Mughal	Tradisi pendidikan Islam dan lingkungan intelektual India	Memperluas interaksi pengetahuan dan kebudayaan.
Kehidupan sosial	Interaksi antarkelompok melalui perdagangan dan kehidupan perkotaan	Kebudayaan Islam dan tradisi masyarakat India	Mendorong pertukaran kebiasaan dan perkembangan kehidupan sosial.

Berdasarkan matriks tersebut, akulturasi budaya pada masa Mughal berlangsung dalam berbagai bidang kehidupan, bukan hanya dalam seni dan arsitektur. Interaksi budaya turut memengaruhi pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Perpaduan tersebut membentuk identitas peradaban Mughal yang khas, meskipun prosesnya juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan kondisi masyarakat pada zamannya.

SIMPULAN

Akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal merupakan proses pertemuan antara kebudayaan Islam, Persia, Asia Tengah, dan India yang membentuk identitas khas peradaban Islam di India. Proses tersebut terlihat dalam berbagai bidang, seperti arsitektur, seni, sastra, pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Perpaduan berbagai unsur kebudayaan menghasilkan karya dan praktik sosial yang mencerminkan kreativitas masyarakat Mughal dalam mengembangkan peradabannya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan peradaban Islam tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan politik dan pemerintahan, tetapi juga oleh interaksi budaya serta pertukaran pengetahuan antarmasyarakat.

Meskipun demikian, akulturasi budaya tidak berarti bahwa seluruh unsur kebudayaan bercampur secara merata atau bahwa hubungan antarkelompok masyarakat selalu berlangsung harmonis. Proses tersebut tetap dipengaruhi oleh kepentingan politik, kebijakan penguasa, dan

kondisi sosial pada zamannya. Oleh karena itu, akulturasi pada masa Mughal perlu dipahami secara kritis sebagai proses sejarah yang dinamis. Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa identitas peradaban Islam dapat berkembang melalui interaksi dengan kebudayaan lain tanpa harus menghilangkan seluruh ciri dasarnya. Dengan demikian, akulturasi budaya menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk keunikan dan kekayaan peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal serta memberikan wawasan bagi masyarakat masa kini dalam menyikapi keberagaman budaya.

SARAN

Kajian mengenai akulturasi budaya pada masa Kerajaan Mughal perlu dikembangkan melalui penggunaan sumber sejarah yang beragam dan terpercaya agar menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, generasi muda diharapkan dapat mengambil pelajaran dari sejarah Mughal dengan menghargai keberagaman budaya, bersikap terbuka terhadap pengetahuan baru, serta tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam tidak hanya dipelajari sebagai kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi kehidupan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu'l-Fazl, A. (2020). *The Ain I Akbari* (H. Blochman, Trans.). Alpha Editions.

Ajmain M., & Maftuh, M. (2026). The Mughal Dynasty in India: Genealogy of power, expansionist politcs, and the causes of its decline. *Islam Ulil Albab*, *7*(1), 45-62.

Agustina, S. M., & Arbi, A. (2024). Kerajaan Mughal: Puncak Peradaban Islam di Tengah Dominasi Agama Hindu di India. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 42482–42488.

Asher C. B. (2020). Making sense of temples and tirthas: Raiput construction under Mughal rule. *The Medieval History Journal*, *23*(1), 9–49.

Ashraf. (2025). Education and training of archery in Mughal India. *Journal of Asian and Africa Studies*, *60*(6), 3989–4000.

Badauni, A.-Q. (2025). *A History of India: Muntakhabu-t-Tawarikh*. Atlantic Publishers & Distributors.

Bhargava, M. (2019). *Understanding Mughal India: Sixteenth to Eighteenth Centuries.* Orient BlackSwan.

Faidi, A. (2020). Akulurasi Budaya Islam dan India: Tinjauan historis terhadap dialektika kebudayaan Islam di India. *Journal of History and Cultural Heritage*, *1*(2), 46–54.

Fazl, A. (2019). *The History of Akbar*. Harvard Universty Press.

Dermawan, F., Daulay, H. P., & Syam, S. T. (2024). A Study on Islamic Culture during the Mughal era in India. *The Future Of Education Journal*, *3*(5), 1940–1947.

Harahab, R. A. (2024). *Sejarah Peradaban Islam*. Tri Selaras Cendekia.

Inayah, I., & Kurniawan, S. (2024). Masa Kejayaan dan Kemunduran Dinasti Mughal di India. *Pendidikan Indonesia*, *5*(12), 1855–1872.

Wulandari I., Bilge, D. K., Suhendro, Hudaidah, & Yusup, R. M. (2025). The Taj Mahal as a Heritage of Islamic Architecture of the Mughal Dynasty. *EL HAYAH: Jurnal Studi Islam*, *15*(2), 141.

Jahangir. (2025). *Tūzuk-i-Jahāngīrī: Or Memoirs of Jahāngīr* (Henry Beveridge, Ed.). Gyan Publishing House.

Mahendra, F. . (2025). *Sejarah kerajaan Mughal: Dari awal berdiri hingga kemunduranya (1526-1857)*. Anak Hebat Indonesia.

Abu'l-Fazl. (2019). *The History of Akbar* (W. M. Thackston, Ed. & Trans.; Vol. 5). Harvard University Press.

Pulungan, J. S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.

Riyadi, A. S. (2019). Ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Dinasti Mughal. *Al-Mujaddid*, *5*(1), 4-5.

Sarmin, S., & Toedien, F. A. (2026). Dinamika transformasi sosial dan pendidikan Islam pada era Mughal di India. *Journal of Eduction Research*, *7*(2), 1019–1030.

Suwarno. (2018). *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. Ombak.

Anwar, W. T. L., Daulay, H, P., & Syam, S. T. (2025). Pengaruh Islam di India dan Jejak Peninggalan Dinasti Mughal Tahun 1526-1858 M. *Indonesia Research Journal on Education (IRJE)*, *5*(1), 88-99.